

Pancasila sebagai solusi krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia

Muhammad Aditya Ferdinan

Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ferdinanadit420@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, demokrasi, kepercayaan publik, era digital, partisipasi masyarakat

Keywords:

Pancasila, democracy, public trust, digital era, public participation

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia yang telah berjalan lebih dari dua dekade sejak Reformasi 1998 menghadapi tantangan serius berupa krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi seperti DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Fenomena ini diperparah oleh maraknya korupsi, polarisasi politik di media sosial, serta rendahnya transparansi dan partisipasi publik. Akibatnya, muncul apatisme politik, terutama di kalangan generasi muda. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penyebab krisis kepercayaan tersebut dan menawarkan solusi melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menjelaskan bagaimana setiap sila Pancasila dapat menjadi jembatan etis dan praktis dalam memperkuat kembali hubungan antara masyarakat dan institusi demokrasi. Implementasi nilai-nilai seperti

keadilan, persatuan, dan musyawarah dinilai penting dalam menciptakan sistem politik yang transparan dan inklusif. Selain itu, penerapan langkah-langkah strategis di era digital—seperti pendidikan Pancasila berbasis teknologi, kampanye anti-hoaks, transparansi kebijakan publik, serta dialog daring partisipatif—dapat meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila, apabila diaktualisasikan secara kontekstual dan digital, memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi moral dan demokratis bangsa Indonesia di tengah tantangan era informasi global.

ABSTRACT

Indonesian democracy, which has been running for more than two decades since the 1998 Reformation, faces a serious challenge in the form of a crisis of public trust in democratic institutions such as the House of Representatives (DPR), the government, and election organizers. This phenomenon is exacerbated by rampant corruption, political polarization on social media, and low transparency and public participation. As a result, political apathy has emerged, especially among the younger generation. This paper aims to analyze the causes of this crisis of trust and offer solutions through the revitalization of Pancasila values. Using a descriptive-analytical approach, this study explains how each Pancasila principle can serve as an ethical and practical bridge in strengthening the relationship between society and democratic institutions. The implementation of values such as justice, unity, and deliberation is considered crucial in creating a transparent and inclusive political system. Furthermore, the implementation of strategic steps in the digital era—such as technology-based Pancasila education, anti-hoax campaigns, public policy transparency, and participatory online dialogue—can sustainably increase public trust. The results of the study show that Pancasila, if actualized contextually and digitally, has great potential to strengthen the moral and democratic foundations of the Indonesian nation amidst the challenges of the global information era.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade sejak era Reformasi 1998. Namun, di tengah kemajuan seperti pemilu yang lebih terbuka dan kebebasan berpendapat, muncul masalah serius: krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, seperti DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Survei pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat Indonesia yang percaya penuh pada DPR, sementara kepercayaan terhadap proses pemilu sering diwarnai tuduhan kecurangan. Krisis ini diperparah oleh maraknya hoaks di media sosial, kasus korupsi pejabat, dan polarisasi politik yang memecah belah masyarakat.

Menurut (Maimun, 2012), penguatan kembali eksistensi Pancasila di dunia pendidikan menjadi hal yang penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar bangsa kepada generasi muda. Pancasila, sebagai ideologi negara, menawarkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, persatuan, dan musyawarah yang dapat menjadi solusi untuk memulihkan kepercayaan publik. Jurnal ini akan membahas mengapa krisis kepercayaan terjadi, bagaimana Pancasila dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan institusi demokrasi, serta langkah-langkah praktis untuk menerapkannya di era digital 2025.

Pembahasan

Krisis Kepercayaan Publik: Apa yang Terjadi?

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi bukanlah hal baru, tapi semakin terasa di era teknologi. Di ruang digital yang dipenuhi informasi yang tidak terfilter, batas antara fakta dan disinformasi menjadi kabur, sehingga kekecewaan publik satu kasus dengan mudahnya berkembang menjadi skeptisisme general terhadap seluruh sistem. Ada beberapa penyebab utama:

1. *Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan*

Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, pejabat pemerintah, hingga penyelenggara pemilu membuat masyarakat kecewa. (Badoh & Dahlan, 2010) dari Indonesia Corruption Watch dalam laporannya tentang "Korupsi Pemilu di Indonesia" menyoroti bahwa praktik korupsi dalam proses elektoral tidak hanya merusak integritas hasil pemilu, tetapi juga secara sistematis menggerogoti kepercayaan publik terhadap seluruh institusi demokrasi. Contohnya, skandal korupsi bansos atau pengadaan publik sering menjadi sorotan di media sosial, memperburuk citra institusi demokrasi.

2. *Polarisasi Politik di Media Sosial*

Media sosial seperti X mempercepat penyebaran hoaks dan narasi yang memecah belah. (Slamet et al., 2009) dalam kajian fenomenologisnya tentang e-demokrasi di Indonesia telah mengidentifikasi bahwa meskipun teknologi digital membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas, namun pada saat yang sama juga menciptakan kerentanan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi yang

dapat menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi. Misalnya, selama pemilu, tuduhan kecurangan sering viral tanpa bukti kuat, membuat masyarakat ragu pada integritas KPU atau Bawaslu

3. *Kurangnya Transparansi dan Partisipasi*

Banyak masyarakat merasa suaranya tidak didengar. Musyawarah, yang seharusnya menjadi inti demokrasi Indonesia, sering kali hanya formalitas. Kebijakan besar, seperti revisi UU, kadang dibuat tanpa melibatkan publik secara luas. Akibatnya, demokrasi cenderung berjalan secara elitis, di mana keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kelompok tertentu dibanding aspirasi rakyat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme demokrasi Pancasila dan praktik politik yang terjadi di lapangan. Jika pola ini dibiarkan, maka partisipasi masyarakat akan semakin menurun dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan terus melemah.

4. *Kesenjangan Sosial dan Ekonomi*

Ketimpangan ekonomi membuat sebagian masyarakat merasa demokrasi hanya menguntungkan elit. Ketidakpuasan ini memperlemah kepercayaan pada sistem demokrasi itu sendiri. Akibatnya, banyak masyarakat, terutama generasi muda, mulai apatis terhadap politik. Mereka merasa demokrasi tidak lagi relevan dengan kebutuhan mereka. Apatisme politik ini bukan sekadar bentuk ketidakpedulian, tetapi merupakan reaksi terhadap ketidakadilan sistemik yang mereka rasakan. Ketika kesenjangan ekonomi terus melebar dan kebijakan publik lebih berpihak pada elit, demokrasi kehilangan daya tariknya sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai Pancasila perlu dihadirkan kembali sebagai pedoman moral dan politik untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berpihak pada segelintir orang, tetapi menjadi wadah bagi kesejahteraan bersama

Pancasila sebagai Jembatan untuk Memulihkan Kepercayaan

Pancasila, dengan lima silanya, bukan sekadar ideologi formal, tapi panduan praktis yang relevan untuk menyelesaikan krisis kepercayaan ini. Berikut bagaimana setiap sila dapat diterapkan:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*

Sila ini mengajarkan nilai moral dan integritas. Institusi demokrasi, seperti DPR atau pemerintah, perlu menunjukkan sikap jujur dan bebas korupsi untuk membangun kepercayaan. Contohnya, pejabat publik bisa lebih terbuka soal harta kekayaan mereka untuk menunjukkan komitmen pada nilai moral.

2. *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*

Demokrasi harus inklusif, memastikan semua kelompok masyarakat—termasuk yang termarginalkan—didengar. Program seperti dialog publik berbasis daring dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, sehingga mereka merasa dihargai (Nelly, 2024).

3. *Persatuan Indonesia*

Penerapan nilai-nilai Pancasila mampu menumbuhkan sikap nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan di kalangan pelajar. Prinsip ini relevan dalam konteks sosial dan politik saat ini, di mana polarisasi politik dapat diatasi dengan menekankan pentingnya persatuan (Sutomo et al., 2021). Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya memecah belah, melainkan menjadi sarana untuk mencari kesepakatan. Oleh karena itu, kampanye berbasis nilai-nilai Pancasila di media sosial dapat mendorong narasi positif yang menyatukan masyarakat, bukan memisahkan.

4. *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*

Sila ini menekankan musyawarah sebagai inti demokrasi. Institusi seperti DPR perlu mengadakan musyawarah terbuka, misalnya melalui konsultasi publik daring, untuk membahas isu sensitif seperti revisi UU atau anggaran negara. Ini akan membuat masyarakat merasa dilibatkan.

5. *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*

Krisis kepercayaan sering berakar pada ketimpangan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang adil, seperti memperluas akses pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat merasa demokrasi membawa manfaat nyata.

Langkah Praktis Menerapkan Pancasila di Era Digital

Untuk membuat Pancasila benar-benar relevan di tahun 2025, berikut beberapa langkah praktis:

1. *Pendidikan Pancasila yang Modern*

Penguatan eksistensi Pancasila dalam dunia pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan kembali kesadaran nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Sejalan dengan pandangan tersebut, pendidikan Pancasila di sekolah maupun universitas harus dikembangkan secara lebih interaktif, misalnya melalui diskusi daring atau simulasi musyawarah. Pendekatan semacam ini membantu peserta didik memahami bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan, tetapi panduan untuk hidup berdemokrasi dan berbangsa secara bijaksana (Maimun, 2012).

2. *Kampanye Anti-Hoaks Berbasis Pancasila*

Pemerintah dan masyarakat sipil bisa bekerja sama dengan platform seperti X untuk membuat kampanye melawan hoaks. Konten yang menonjolkan nilai persatuan dan keadilan sosial dapat mengurangi polarisasi.

3. *Transparansi Institusi*

Institusi demokrasi, seperti KPU atau DPR, harus memanfaatkan teknologi untuk transparansi. Misalnya, menyediakan laporan keuangan atau proses pengambilan kebijakan secara daring yang mudah diakses publik.

4. *Dialog Publik Berbasis Teknologi*

Pemerintah bisa mengadakan forum daring berbasis aplikasi seperti Zoom atau platform lokal untuk mendengar aspirasi masyarakat. Ini mencerminkan semangat musyawarah dalam sila keempat.

5. *Pemberantasan Korupsi yang Nyata*

Institusi seperti KPK perlu diperkuat, dan kasus korupsi harus diselesaikan secara transparan. (Waluyo, 2022) menegaskan bahwa optimalisasi strategi pemberantasan korupsi, termasuk penguatan kelembagaan dan penuntasan kasus secara transparan, merupakan prasyarat fundamental untuk mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ini akan menunjukkan bahwa nilai ketuhanan dan keadilan dalam Pancasila benar-benar dijalankan.

Kesimpulan dan Saran

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia adalah tantangan besar, terutama di era digital yang penuh dengan hoaks dan polarisasi. Namun, Pancasila menawarkan solusi yang relevan melalui nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan musyawarah. Dengan pendidikan yang modern, transparansi institusi, dan pemanfaatan teknologi untuk melibatkan masyarakat, Pancasila dapat menjadi jembatan untuk memulihkan kepercayaan publik. Di tahun 2025, saat teknologi semakin mendominasi, Pancasila harus dihidupkan kembali sebagai panduan praktis, bukan sekadar simbol, agar demokrasi Indonesia tetap kuat dan inklusif.

Keempat saran yang diajukan untuk pengembangan penelitian ini bertujuan menciptakan kerangka implementasi yang komprehensif, dimulai dengan penyusunan indikator keberhasilan yang terukur untuk setiap inisiatif, dilanjutkan dengan penelitian mendalam mengenai model digitalisasi nilai-nilai Pancasila yang efektif bagi generasi muda. Selanjutnya, integrasi prinsip tata kelola berbasis Pancasila ke dalam operasional institusi demokrasi diperlukan untuk memastikan konsistensi, sementara penyusunan strategi mitigasi yang proaktif penting untuk mengantisipasi resistensi dan politik identitas, sehingga transformasi nilai Pancasila dapat diwujudkan secara sistematis dan berkelanjutan di era digital.

Daftar Pustaka

- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.
- Maimun, A. (2012). *Mengukuhkan kembali eksistensi Pancasila di dunia pendidikan*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6462/>
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94.
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). *E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>

- Sutomo, S., Miftahusyai'an, M., Al Kamil, M. S., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad Yani Jabung. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 95–104. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.